

2022

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATENTANAH LAUT
TAHUN 2022**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini, adalah uraian terinci dari capaian kinerja Badan Kesbangpol. Adapun tahapannya adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh. Hal tersebut bukan hanya sebagai alat pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja semata, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Badan Kesbangpol ini bisa menunjukkan informasi-informasi yang telah berjalan dari sisi perencanaan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Badan Kesbangpol, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya keberhasilan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yaitu keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, yang di dukung oleh dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja seluruh Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Pemilihan dan penerapan strategi pencapaian sasaran yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang termuat di dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut tentunya bisa dilihat di dalam pelaksanaannya di mana dijumpai beberapa kendala, namun demikian kami telah berupaya menempuh strategi yang dirasa tepat untuk mengeliminasi maksud mengurangi kendala yang ditemui.

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik.

Demikianlah ringkasan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, yang tentunya ke depan menjadi perhatian kami untuk penyempurnaan penerapan LAKIP, khususnya pengembangan sistem pengumpulan data dan perangkat kerjanya.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ISU STRATEGIS.....	15
D. PRODUK DAN LAYANAN	16
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II. RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. VISI RPJMD.....	23
B. MISI RPJMD.....	23
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	24
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
E. PERJANJIAN KINERJA.....	26
F. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	31
1. SASARAN RP JMD.....	31
2. Eselon II (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	36
3. Eselon III (Sekretaris) A.....	49
1. Eselon IV (Kasubbag Perencanaan & Keuangan)...	51
2. Eselon IV (Kasubbag Umum & Kepegawaian)	52
3. Eselon III (Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan)	55
4. Eselon III (Kepala Bidang Politik)	57
5. Eselon III (Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi).....	59
6. Eselon III (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional).....	60

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	86
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022.....	86
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program....	94
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan Tahun 2022	96
 BAB. IV. PENUTUP	 102
A. Kesimpulan	102
B. Strategi Peningkatan Kinerja	103

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai	10
2. Tabel 1.2 Kualifikasi Pendidikan	11
3. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	11
4. Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Pejabat Struktural	12
5. Bagan Struktural (SOTK) 2022	13
6. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan SKPD.....	26
7. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Eselon II	26
8. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Terhadap Target 2022	31
9. Tabel 3.2 Perbandingan dari Tahun ke Tahun	32
10. Tabel 3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target 2022	33
11. Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama	36
17. Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Tahun 2022	37
18. Tabel 3.6 Daftar Konflik Tahun 2022	38
19. Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol	46
20. Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja III Sekretaris	49
21. Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perenc & Keuangan	51
22. Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Umpeg	52
23. Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	55
24. Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Kabid Politik	57
25. Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Kabid Ketahanan	59
30. Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Kabid Kewaspadaan Nasional	61
31. Tabel 3.15 Capaian Sasaran Sesuai Misi Badan Kesbangpol	64
32. Tabel 3.16 Capaian Pencapaian Sasaran Strategis	68
33. Tabel 3.17 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1.....	70
34. Tabel 3.18 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2.....	71
35. Tabel 3.19 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3.....	73

36. Tabel 3.20	Partai Politik yang Aktif berpolitik	75
37. Tabel 3.21	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 4	76
37. Tabel 3.22	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 5	77
37. Tabel 3.23	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 6	78
37. Tabel 3.24	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 7	79
37. Tabel 3.25	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 8	81
37. Tabel 3.26	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 9	82
37. Tabel 3.27	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 10	83
38. Tabel 3.28	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 11	84
39. Tabel 3.29	Analisa Pencapaian Sasaran Strages 12	84
40. Tabel 3.30	Keberadaan Tenaga PTT	85
41. Tabel 3.31	Realisasi Belanja Tahun 2021 dn 2022	86
42. Tabel 3.32	Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.....	88
43. Tabel 3.33	Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	94
44. Tabel 3.34	Ringkasan APBD Tahun 2020 Terhadap Tahun 2021.....	95
45. Tabel 3.35	Perbandingan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan 2022	96
46. Tabel 3.36	Jumlah program, Kegiatan Sub Kegiatan	100
46. Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Tahun 2021/2022	101

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja 2021
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan
8. SK TIM Penyusunan LAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pelayanan publik dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan Anggaran yang dialokasikan kepada Bupati, dapat dilaksanakan.

Maka dengan adanya regulasi ini Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah berupaya untuk menyusun Laporan Kinerja untuk tahun 2022. Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut :

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- b. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUMBER DAYA APARATUR

1. Struktur Organisasi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian keuangan dan perencanaan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Bidang Kewaspadaan Nasional
- c. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,
- d. Bidang Politik:
- e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

2. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

1.1 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA)
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Mengumpulkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana dan program kerja sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- d. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. Melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. Mengendalikan arsip aktif;
- g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. Mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- m. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kanupaten Tanah Laut di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

4) Bidang Politik

Bidang Politik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

5) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara,karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan:

6) Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku ;
- b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara ;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional ;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik ;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan silitasi pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugaas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasdi bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

7) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kabupaten Tanah Laut sebanyak 30 Orang (Tiga Puluh Lima) orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai

No	Jabatan	Junlah
1.	Kepaka Kesbangpol	1 Orang
2	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5	Analisis Kebijakan Muda	6 Orang
6	Fungsional	1 Orang
7	Staf	15 Orang
	Jumlah	30 Orang

Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPS	
1	SD	-	-	-
2	SMP	2	-	2
3	SMA	3	-	3
4	D3	3	-	3
5	S1	16	1	17
6	S2	5	-	5
	Jumlah	29	1	30

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tk.I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV.a	6 Orang
4	Penata Tk.I	III.d	9 Orang

5.	Penata	III/c	3 orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	1 orang
7.	Penata Muda	III/a	3 orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	3 orang
9.	Pengatur	II/c	1 orang
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	0 orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 orang
12.	Juru TK. I	I/d	1 orang
13.	Juru	I/c	0 orang
	Jumlah	-	30 Orang

Adapun jumlah Pejabat Dstruktural dan Fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

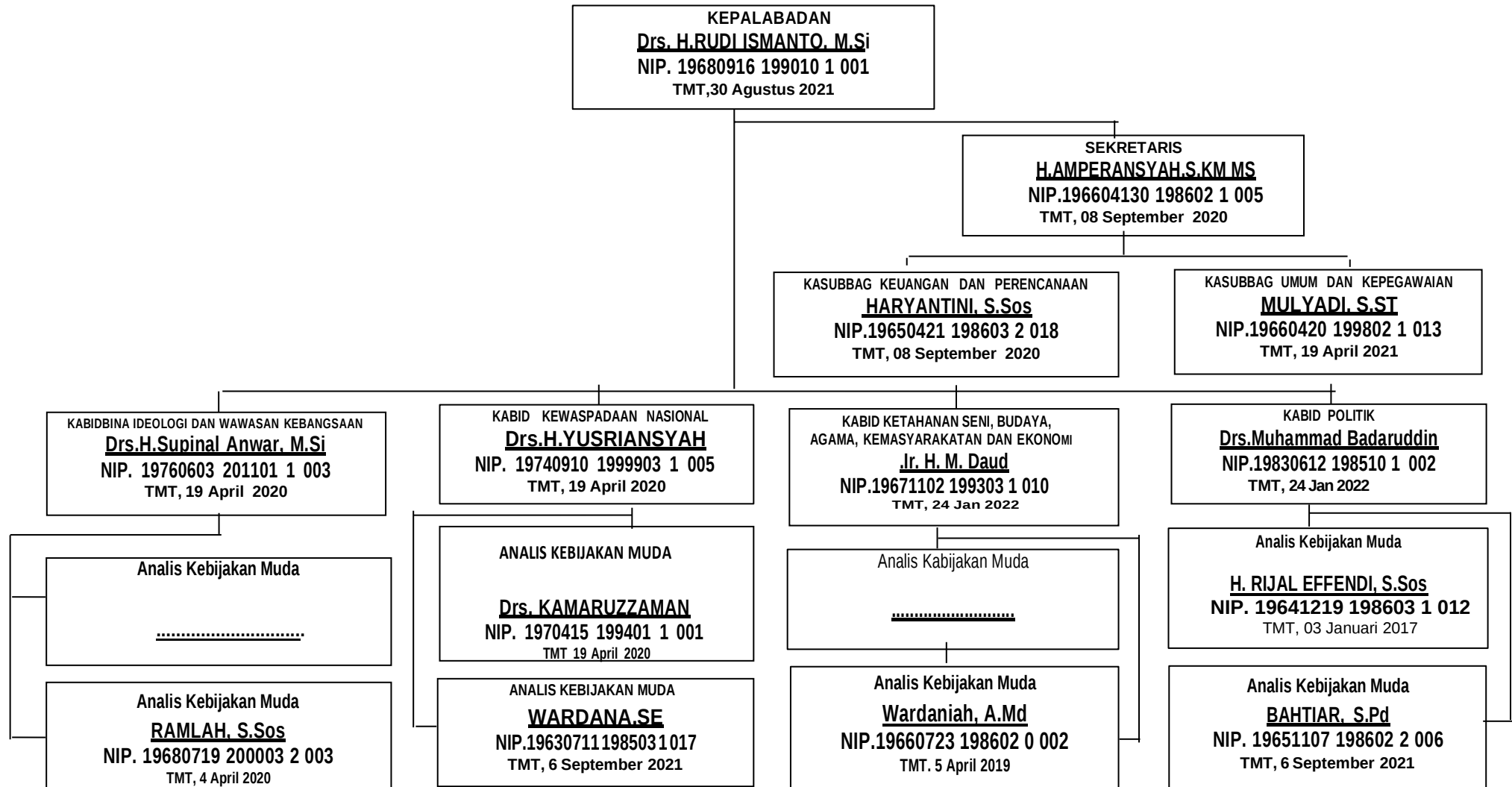
Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Kesbangpol	1 orang	-
2.	Sekretaris Kesbangpol	1 orang	-
3.	Kepala Bidang	4 orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang	-
5.	Analisis Kebijakan Muda	6 orang	-
6.	Pejabat fungsional tertentu	-	1 Orang
7.	Pejabat Fungsional umum	-	15 Orang
	Jumlah	14 orang	16 orang

3. Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2022 (Terlampir)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**



C. ISU STRATEGIS

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu strategis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut menggunakan analisis SWOT sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang-tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis yang ingin dikembangkan adalah :

Saling mendukung antara Pemerintah Kabupaten dengan Partai- partai Politik untuk menangkap peluang penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang berpotensi membuat dinamisnya pergerakan politik.

Banyaknya keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat baik itu secara swadaya atau berkoordinasi dengan pemerintah dengan berlandaskan pada kesadaran dan berbangsa dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia yang ditunjang adanya pendidikan politik yang sudah dimulai dan ditanamkan sejak dini.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait, melakukan monitoring dan evaluasi Ipoleksosbud untuk menangkap peluang yang secara umum tidak bisa **diprediksi kapan ATHG akan muncul dan untuk mengimbangi makin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.**

Penentuan Isu – isu

strategis Kekuatan/

Strenght (S)

1. Struktur Organisasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
3. Dukungan Pemerintah Daerah, adanya Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (KDPD) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk peningkatan keamanan dan ketertiban daerah.
4. Koordinasi Lintas Sektor yang cukup harmonis.

Kelemahan/ Weakness (W)

1. Belum terpenuhinya kualifikasi Sumber Daya Manusia yang berkompetensi sesuai seperti apa yang diharapkan.
2. Partisipasi masyarakat terkait ketentraman lingkungan masih rendah
3. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat;
4. Lunturnya pemahaman ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Timbulnya paham-paham liberal, intoleransi, radikalisme dan kurangnya partisipasi masyarakat akan adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud.
6. Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan difasilitasi belum dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat (FKDM)

Peluang (Opportunities)

1. Peraturan yang mendukung.
2. Perubahan Sistem Politik
Terjadinya perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses kehidupan politik yang demokratis, dinamis dan kondusif.
3. Dukungan Stakeholder
Stakeholder yang terkait dengan kehidupan politik di daerah dirasakan sangat tinggi, nampak jelas dari kesediaan mereka menyediakan data, kehadiran mereka pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.

D. PRODUK DAN LAYANAN

1. **Pada Bidang Kewaspadaan Nasional**, menerbitkan yaitu :
 - Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/305-KUM/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Organisasi Masyarakat/ Lembaga Asing di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
 - Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/306-KUM/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Pencegahan Kejahatan dan Pesisir di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 581-KUM/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 582-KUM/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Darah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 632-KUM/2022 Tanggal 8 April 2022 Tentang Besaran Honorarium Tim Tenaga Ahli Pencegahan Kejahatan Laut dan Pesisir di Darah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 633-KUM/2022 Tanggal 8 April 2022 Tentang Besaran Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Darah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 634-KUM/2022 Tanggal 8 April 2022 Tentang Besaran Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/1165-KUM/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Besaran Makan Minum Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/1138-KUM/2021 Tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/280-KUM/2022 Tentang Tim Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/1143-KUM/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Penunjukkan Narasumber Kegiatan pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

3) Pada Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama , Kemasyarakatan dan Ekonomi. menerbitkan yaitu :

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/71-KUM/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pemberian Uang Untuk Organisasi Kemasyarakatan

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/72-KUM/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/ 73-KUM/2022 Tanggal 25 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/74-KUM/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/458-KUM/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

4) Pada Bidang Politik , menerbitkan yaitu :

- Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/459-KUM/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penetapan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/ 297-KUM/20212 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Besaran Honorarium Tim Penelitian Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/541-KUM/2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Besaran Honorarium Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

5) Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

menerbitkan yaitu :

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/670-KUM/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Besaran Honorarium pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/576-KUM/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Penunjukan dan Besaran Honorarium Narasumber dan Perangkat pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantaraan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2022.

Dari produk-produk Kesbangpol yang berupa Peraturan Bupati Tanah Laut dan Surat-Surat Keputusan Bupati Tanah Laut seperti disampaikan diatas adalah sebagai **bukti dukung Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Tanah Laut.**

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyajian Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor. 50 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Adapun Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini disusun dengan sistematik penulisan sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ISU STRATEGIS.....	15
D. PRODUK DAN LAYANAN	16
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II. RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. VISI RPJMD.....	23
B. MISI RPJMD.....	23
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	24
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
E. PERJANJIAN KINERJA.....	26
F. PROGRAM DAN EGIATAN.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	31
1 SASARAN RPJMD.....	31
2. Eselon II (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	36
3. Eselon III (Sekretaris) A.....	49
1. Eselon IV (Kasubbag Perencanaan & Keuangan) A.1	51
2. Eselon IV (Kasubbag Umum & Kepegawaian) A.2	52
4. Eselon III (Kepala Bidang Bina Edeologi dan Wawasan Kebangsaan) B	55
5. Eselon III (Kepala Bidang Politik) B	57

6.	Eselon III (Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemaayarakatan dan Ekonomi)	59
7.	Eselon III (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional)	60
B.	AKUNTABELITAS KEUANGAN	86
1.	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022	86
2.	Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program ..	94
3.	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan Tahun 2022,	96
BAB. IV	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan	102
B.	Strategi Peningkatan Kinerja	103

-

LAMPIRAN :

1. Indikator kinerja Utama (IKU)
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan
8. SK TIM Penyusunan LAKIP
9. SOP LAKIP

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya lebih operasional dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi cara lebih cepat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mebuat Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023.

A. Visi RP JMD

Dan dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 memiliki Motto : KERJA KERAS , CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS. Dengan Visi pembangunan adalah : Terwujudnya Tanah Laut yang ” BERINTERKASI ” , Berkarya, Inovasi, Tertata, religius , Actual dan Sinergi., maka untuk pencapaian ditetapkan Misi daerah sebagai berikut :

B. Misi RPJMD

Misi 3

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Dengan Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Misi 4

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat

Dengan Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah Misi 3 dan Misi 4, karena merupakan pencerminan apa yang ingin dicapai dalam mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut “ karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi.

Perangkat Daerah yang merupakan elemen penting dalam mensukseskan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mewujudkannya sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan budaya politik yang positif dan santun bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
2. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai persatuan bangsa;
3. Mewujudkan tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini sebagai daya tangkal dan daya cegah untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
4. Mewujudkan kualitas dukungan operasional organisasi;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kehidupan politik yang Demokratis, Dinamis dan Kondusif;
2. Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai persatuan bangsa;
3. Tercapainya tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini bagi generasi penerus bangsa
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kesbangpol serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kesbangpol menetapkan sasaran sebagai tabel berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
3. Meningkatnya Organisasi/ Lembaga politik yang aktif berpolitik
4. Meningkatnya penanganan pengaduan konflik
5. Meningkatnya forum kewaspadaan dini
6. Melaksanakan sosialisasi dan pemantapan bela negara serta forum pembauran kebangsaan
7. Melaksanakan sosialisasi/pengembangan desa etnis/suku dan forum pembauran
8. Meningkatkan kerukunan/keharmonisan antar unit beragama
9. Meningkatkan ketahanan, seni, agama , kemasyarakatan dan ekonomi.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
12. Meningkatnya pemenuhan dan pemeliharaan sapras kantor.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Nomor : 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategi organisasi. penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut serta RPJMD tahun 2014 – 2018 dan RPJMD Tahun 2018 - 2023 Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 yang memiliki focus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018 – 2023 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100%	100%

No	Kinerja Utama Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Jml gangguan/Konflik sosial yang di tangani ----- x 100% Jumlah <i>gangguan Konflik sosial</i> yang terjadi	Semua Bidang

E. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5
1	KEPALA bADAN	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100 %
2	SEKRETARIS	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%
			Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB (11.00)

3	<u>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan</u>	Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen
			Nilai komponen perencanaan dan penyusunan pada SKPD	BB (11,00)
		Melaksanakan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Penyusunan dokumen terkait	4 Dokumen
4	Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian,Evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan adminstrasi sesuai SOP	25 ASN
		Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemenuhan, pemeliharaan sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit
		Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 PTT
5	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100%
			Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang Ideologi pembauran wasbang, bela Negara dan karakter Bangsa	100%
6	Kepala Bidang Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%
			Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%

7	Kepala Bidang Ketahanan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%
	KEPALA BIDANG WASNAS	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%
			Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 telah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai hasil KUA/PPAS dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 ,Oleh Tim TAPD dan Tim anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 6 (Enam) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun anggaran 2022 dengan rincian program, kegiatan dan sub Kegiatan seperti dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

- 5) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- 6) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - c) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 7) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Penyusunan perencanaan dan kinerja SKP
 - a) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- 8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1) Sasaran RPJMD

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama melalui 1 Indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Kasus	0	0	0	0	100%
Rata-rata capaian kinerja							100%

1. Perbandingan realisasi dengan target

Jumlah konflik intern dan antarumat beragama Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 tidak ada konflik dari target 0 konflik, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021. Target ditetapkan 0 diharapkan tidak terjadi konflik namun selama Tahun 2021 tidak ada kejadian atau konflik antar umat beragama dan diharapkan tidak terjadi lagi, Capaian kinerja Jumlah konflik intern dan antar umat beragama adalah sebesar 100%.

Tabel 3.2
Perbandingan dari Tahun ke Tahun

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2021	0	Tidak ada kejadian (Kasus)
2	2022	0	Tidak ada kejadian (Kasus)

2. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya mempertahankan/ menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik social yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun apabila sesudah terjadi konflik maka cakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Meningkatnya kewaspadaan Nasional

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah konflik sosial (kasus)	Kasus	0	0	0	0	100%
Rata-rata capaian kinerja							100%

Tahun 2022 yaitu 2 tentang konflik sosial dalam kehidupan masyarakat tersebut telah diselesaikan, dengan kronologi sebagai berikut;

1. Larangan Lewat badan jalan Desa yang merupakan akses vital warga

Manajemen PTPN 13 bersama Pemerintah Desa Tebingsiring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pertemuan dengan kalangan penambang batu gunung, Rabu 2 November 2022, Penambang batu gunung tersebut yang beroperasi di sekitar kebun PTPN 13 yang juga berdekatan dengan Tebing Siring dan Tercatat delapan penambang batu gunung yang beroperasi di wilayah setempat.

Pertemuan bertempat di aula kantor Desa Tebingsiring dipimpin Asisten Humas PTPN 13 Arnold W didampingi Kades Tebingsiring Ketang Subagio beserta kepala Dusun. Dan hadir pula beberapa pihak terkait lainnya. Adapun Agenda pertemuan membahas perbaikan jalan sepanjang 4,7 kilometer di area HGU PTPN 13 yang menjadi akses vital warga Tebing Siring keluar kampung, Kondisi jalan tersebut becek dan licin yang sulit dilintasi pada musim penghujan.

Pada pertemuan tersebut terungkap kalangan penambang batu gunung tersebut selama ini juga melintasi jalan HGU PTPN 13 itu. hanya saja sejak beberapa pekan terakhir tak lagi melintasi menyusul adanya larangan lewat agar badan jalan tersebut tak kian rusak, meski begitu ketika diminta kontribusi menyiapkan material untuk perbaikan jalan tersebut, pihak penambang batu gunung tersebut tetap menyatakan kesiapannya.

Sebelumnya pihak Pemdes Tebingsiring dan PTPN 13 memaparkan keperluan batu gunung untuk memperbaiki badan jalan sepanjang 4,7 kilometer tersebut sekitar 80 ret, dan rencana penanganan jalan tersebut pada rentang waktu dua bulan yakni November dan Desember 2022.

Dua perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah setempat, PT KJW dan CPKA, juga menyatakan kesiapannya membantu material. begitu pula penambang batu gunung dari Puskopad. hahkan pihak penambang batu gunung mempersilakan PT.KJW dan CPKA mengambil material Gratis.

2. Sengketa lahan antara kelompok masyarakat Desa Jorong dengan PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA).

Sengketa tersebut sudah memasuki ranah hukum. kasus ini sudah berproses hingga sampai dua lembaga hukum sekaligus, DPRD Tanah Laut (Tala) melalui Komisi I telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk melakukan audiensi terhadap kedua belah pihak pada Senin, 5 September 2022.

Ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra mengatakan, pihaknya tetap menjalankan fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat meski proses hukum telah berjalan, sebelum audiensi oleh DPRD, kasus ini juga sudah masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari, bahkan ada yang membawa hingga ke Polda Kalimantan Selatan, berdasarkan aturan yang ada jika kasus telah berproses pada lembaga hukum, maka pihak legislatif bahkan eksekutif tidak ada wewenang campur tangan.

Pada saat RDPU kemarin dihadiri juga oleh pihak eksekutif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, ada juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tala hingga pihak Kecamatan Jorong melalui Sekretaris Camat. Semua hadir mendengarkan duduk perkara atas kasus ini, namun, karena sudah berproses hukum, maka hanya bisa mengawal sampai ada putusan.

Menurut Yoga, seandainya belum sampai proses hukum, ada alternatif yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait kasus ini.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat lantaran menurut masyarakat ada beberapa bidang tanah yang dimanfaatkan oleh PT. SSA. Lahan pinjam pakai milik masyarakat sekitar 200 hektare sejak tahun 1980.

Di mana, 170 hektare di antaranya untuk peternakan dan 30 hektare lainnya untuk perkebunan sawit, dan masyarakat berharap ada kompensasi ganti rugi maupun bagi hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Namun, pihak PT. SSA juga punya argumentasi dan bukti tersendiri bahwa tanah tersebut telah menjadi milik mereka karena telah melakukan pembebasan lahan sebelumnya.

ada kompensasi ganti rugi maupun bagi hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Namun, pihak PT. SSA juga punya argumentasi dan bukti tersendiri bahwa tanah tersebut telah menjadi milik mereka karena telah melakukan pembebasan lahan sebelumnya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut agar tidak lagi terjadi konflik sosial :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan :
- 4) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, dan aspirasi masyarakat
- 5) Melakukan sosialisasi peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik social.
- 6) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik sosial diwilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, oleh karena itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Capaian indikator kinerja utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menghitung capaian indikator kinerja utama dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditentukan.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

	Kinerja Utama Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	2	3	4	5
	Terjaganya Stabilisat Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Jml gangguan/Konflik sosial yang di tangani ----- x 100% Jumlah <i>gangguan Konflik</i> <i>sosial</i> yang terjadi	Semua Bidang

2.) Eselon II (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Target indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Meningatnya potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani serta meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat yang selalu menjaga nilai – nilai kebersamaan dalam menghadapi permasalahan.

Indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon II. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan Sub Kegiatannya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Wawasan Nasional telah menjalankan kegiatan tersebut dengan realisasi 100% Kinerjanya dan capaian realisasi keuangannya sebesar 99,95%,

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Eselon II

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%

Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik sosial.

a. Uraian Capaian IKU (Eselon II)

Pada tabel 3.5 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU). Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

Indikator kinerja utama yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik adalah potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

Perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial.

yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Tabel : 3.6
Daftar Konflik Sosial Tahun 2021

No	Konflik Terkait Sosial	Keterangan
1	Larangan Lewat badan jalan Desa yang merupakan akses vital warga	PT KJW dan CPKA,
2	Sengketa lahan antara kelompok masyarakat Desa Jorong dengan PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA).	PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA).

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk :

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera, Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
3. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
4. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
5. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Hasil laporan dari daerah-daerah bahwa sumber terjadinya konflik sosial adalah :

Larangan Lewat badan jalan Desa yang merupakan akses vital warga dan Sengketa lahan antara kelompok masyarakat Desa Jorong dengan PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA).

Permasalahan Selama tahun 2022 terdapat 2 permasalahan/ konflik/ kasus yang terjadi yang sumber terjadinya konflik di akibatkan seperti point c dan d diatas. Sedangkan untuk konflik/kasus yang diakibatkan oleh Larangan Lewat badan jalan Desa dan Sengketa lahan dan penyelesaiannya adalah kesepakatan kedua pelah pihak.

Adanya peran serta Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menangani masalah yang terjadi. Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Kewaspadaan Nasional telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 % dan capaian sebesar 100% dengan penjelasan terhadap rumusan yang dimaksud diatas adalah Jumlah konflik /kasus Etnis kerusuhan/ radikalisme tahun 2022 tidak ada kasus, dan Laporan/ pengaduan kejadian konflik /kasus **Etnis** kerusuhan/ radikalisme yang masuk 0 kasus.

Rapat Tim Tenaga Ahli Kemitraan Dengan TNI AL)





Kegiatan Penyuluhan Narkoba dan Zat Adektif lainnya.







Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target

Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018 – 2023 telah menetapkan beberapa Sasaran Strategis. LAKIP untuk tahun 2022 adalah awal Tahun Pelaksanaan Renja Kabupaten Tahap 4 (empat).

Sesuai dengan keadaan Renstra dibuat bahwa untuk setiap sasaran kemungkinan lebih dari satu indikator kinerja sasaran maka, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022. Berikut tabel sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut :

Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	1. Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	1. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1. Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0
			2. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	2. Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0
		1. Meningkatnya Pendidikan Politik	1. Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik	1. Jumlah monitoring, evaluasi peningkatan demokrasi fasilitasi Kelembagaan pemilihan umum	70%	75%	11 Kec	0	0
		Jumlah Parpol penerima Bantuan Keuangan (hibah Parpol)	2. Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan (hibah Parpol) sesuai ketentuan yang berlaku	2. Persentase Parpol yang menerima Bantuan Keuangan yang memenuhi Persyaratan	0	100%	100%	100%	100%
		1. Pembinaan terhadap Ormas/LSM / OKP, Mahasiswa dan Pelajar	1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba dan Pekat	1. Persentase Pembinaan terhadap Ormas /LSM/ OKP, Mahasiswa dan Pelajar.	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Jumlah Dana Hibah Ormas / LSM	2. Meningkatnya Jumlah Pemohon	2. Jumlah Ormas / LSM yang memohon	0	3	4	4	4
		3. Jumlah lembaga ke Agamaan yang aktif dalam meningkatkan Produktivitas umat (Lembaga)	3. Meningkatnya ketahanan Seni budaya, agama, kemasyarakatan dan Ekonomi	3. Terlaksananya Organisasi / lembaga kemasyarakatan yang aktif	15	20	25	30	40

		4	Jumlah Desa Peduli Toleransi	4	Meningkatnya Kerukunan / keharmonisan antar umat beragama	4	Jumlah furom antar umat beragama/ lembaga agama yang aktif	0	1	1	2	3
2	Terwujudnya tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini bagi masyarakat	1	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dalam hal mendeteksi ATHG d Daerah	1	Meningkatkan peran forum Kewaspadaan Dini (FKDM)	1	Persentase forum konflik Kewaspadaan Dini dan Tim Kewaspadaan Dini yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing Kabupaten (%)	2	Meningkatnya pengawasan orang asing dan lembaga asing	2	Persentase pengendalian dan pengawasan orang Asing dan lembaga asing	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jumlah Desa Sadar Penyelesaian konflik (desa)	3	Meningkatkan Penanganan Pengaduan Konflik	3	Meningkatkan kapabilitas cegah dan tangkal dini serta penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat	0	0	1	2	4
	Persentase Fasilitas Furom Pembauran	1	Persentase Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1	Meningkatnya kesadaran Pembauran masyarakat dalam berkebangsaan	1	Persentase kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Kebhenika Tunggal Ika	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi Pemuda, Remaja usia sekolah (%) Kelempok Masyarakat / LSM.	2	Meningkatkan wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat	2	Jumlah kelompok masyarakat /LSM organisasi pemuda yang aktif berorganisasi	7	10	12	15	20
		3	Jumlah Desa multi etnis (Multikulturalisme)	3	Meningkatnya kerukunan / keharmonisan antar umat beragama dalam kebangsaan	3	Menciptakan stabilitas / ketentraman masyarakat antar suku/Etnis	0	1 Desa (8 suku)	1	0	0

3	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi yang tertib efektif dan efisien	1	Menerapkan SOP untuk administrasi di SOPD	1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	1	Indek Kepuasan Masyarakat	71	71.5	72	72,5	73,43
		2	Meningkatkan tertib administrasi	2	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan	2	Nilai SAKIP SKPD	B	B	B	B	B
		3	Menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang	3	Meningkatnya tata kelola sistem perkantoran	3	Persentase tata kelola yang dipenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaihari, September 2019

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut,



Drs.H.M. RAFIKI EFFENDI, M.Si
NIP.19640214 198703 1 012

2.) Eselon III (Sekretaris) A

Target indikator kinerja Eselon III (Sekretaris) A Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018 - 2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sekretaris Badan Kesbangpol
Kabupaten TanahLaut Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	<u>Sekretaris</u> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100 %	100%	100%
		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB (11.00)	BB	BB

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon III)

Pada tabel 3.8 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja EselonIII pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian.

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politikpada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah di Sekretariat telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 %, realisasi fisik 99,37% dan realisasi keuangan capaian sebesar 73,30%.

2. Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang ke sekretariat telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 % dan ralisasi fisik 100% sedangkan capaian sebesar 94,79%.

3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Ke Sekretariat telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target **BB (80,00)** dan dengan capaian **BB**.

2.1) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) A1

Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) A1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut

:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	<u>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan</u> Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Nilai komponen perencanaan dan penyusunan pad SKPD	BB (11,00)	BB	BB
2	Melaksanakan penyusunan dokumen terkait administrasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Nilai secara berkala	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon IV)

Pada tabel 3.9 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja

Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja . Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Adapun Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan tersebut yaitu : - Penyediaan gaji dan Tunjangan

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 12 Bulan dan capaian sebesar 94,79%

2. Nilai komponen perencanaan dan penyusunan pad SKPD

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politikpada Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target **BB (11,00)** dan terealisasi **BB**

3. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala.

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator iniadalah Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkatan Daerah. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan tersebutyaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 4 Dokumen 100% walaupun dananya tidak ada.

2.2) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A2

Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023

Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU)yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah LautTahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

1	<u>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</u> Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	30 ASN	100%
2	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemenuhan, pemeliharaan sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	16 Unit	90,57%
3	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 PTT Orang	6 PTT Orang	100%

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon IV)

Pada tabel 3.10 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja .Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP.

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program tersebut yaitu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang menunjang kegiatan yaitu Sub Kegiatan adalah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 30 ASN terealisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 95,74%

2. Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Sub Keegiatannya adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 16 Unit dan terealisasi sebesar 63,02%

3. Jumlah tersedianya Jasa Penunjang urusan Umum

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Ulama Kantor.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga target 6 Orang TPP dan belum tercapai 100%.

3) Eselon III (Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) B

Target indikator kinerja Eselon III (Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<u>Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</u>				
1	Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	Persentase Jumlah kelulusan peserta Penyuluhan/ Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100 %	99.00%	99,00 %
		Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang Ideologi pembauran wasbang, bela Negara dan karakter Bangsa	100%	100,00%	100%

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon III)

Pada tabel 3.11 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja selon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja . Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut.

1. Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan/ sosialisasi , Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran.

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani program ini adalah Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah menjalankan program tersebut dengan target 100% dan capaian sebesar 75,97%

2. Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di Bidang Ideologi, pembauran wasbang , bela Negara dan karakter bangsa

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Bina Ideologie dan Wawasan Kebangsaan menjalankan program tersebut dengan target 100% dan capaian sebesar 67,36%

1. Eselon III (Kepala Bidang Politik) B

Target indikator kinerja Eselon III (Kepala Bidang Politik) B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2019- 2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<u>Kabid Politik</u>				
	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%	99,24%	99,24%
		Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon III)

Pada tabel 3.12 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut.

1. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .

//Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah Bidang Politik telah menjalankan Kegiatan tersebut dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 99,24 %

2. Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon IV. Dalam hal ini kegiatan yang mendukung salah satu indikator ini adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Politik telah menjalankan Kegiatan tersebut dengan target 10 parpol dan terealisasi sebesar 100% dengan pencapaian besaran 100%.

6. Eselon III (Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi) B

Target indikator kinerja Eselon III (Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi) B, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :Tabel 3.12

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<u>Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi</u>				
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	80,01%	80,01%

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon III)

Pada tabel 3.13 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja . Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu

indikator ini adalah Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang telah menjalankan Kegiatan tersebut 3 Ormas (PWRI, ICMI dan FKUB) dengan target 100 % dan capaian sebesar 100%

2. Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung wawasan kebangsaan, Adapun yang dilaksanakan Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan sub kegiatan Kegiatan yang mendukung Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Katahanan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 426 Orang dan terealisasi sebesar 426 Orang dan besaran (100%)

4.) Eselon III (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional) B

Target indikator kinerja Eselon III (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	<u>Kabid Kewaspadaan Nasional</u> Meningkatnya Kewaspadaan Nasional, peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%	99,95%	100%
		Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	67,00%	16,44%

Uraian Capaian Indikator Kinerja (Eselon III)

Pada tabel 3.14 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja . Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen.

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Adapun kegiatan yang mendukung Program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Adapun Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan tersebut yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan, menangani kegiatan ini adalah di Bidang Kewaspadaan Nasional yang telah menjalankan kegiatan penanganannya.

Potensi konflik sosial sebanyak 2 kasus (Bab III Hal. 34,35) Kasus tersebut dengan target 0 Kasus dan capaian sebesar 100 %. Karena sudah terselesaikan secara musyawarah, dan adapun jumlah orang asing s/d 31 Desember 2022 sejumlah Orang yang berbeda-beda Negara dan kesemuanya telah dilaksanakan pengawasan sesuai data dari Kantor Imigrasi Banjarmasin dan fakta dilapangan dengan target 100 % dan capaian sebesar 99.95%

1. Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota.

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Kewaspadaan Nasional telah menjalankan kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah sebanyak 2 kali sedangkan kegiatan tersebut masih ada karena terkendala dengan waktu dan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga kegiatannya baru mencapai 67 % dengan target 100% dan terealisasi keuangan sebesar 16,44%

Uraian Capaian Sasaran sesuai Misi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah menjalankan tahun anggaran 2022, yang mana telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsi itu sendiri. Ditinjau dari capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan misi maka kita dapat lihat penjelasannya pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Sesuai Misi
Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kuantitasdan kualitas relegiusitas dalam penyelenggara an pemerintah Daerah dankehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	1. Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	1) Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	Sudah tertangani
			2. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional,Peningkat an kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	2) Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%	99,95%	99,95%	Hampir Mencapai Target
				3) Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	16,44%	16,44%	Sangat Kurang
			3. Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4) Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%	92,24%	92,24%	Tidak Mencapai Target
				5) Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	Sudah Mencapai Target

	Mewujudkan tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini sebagai daya tangkal dan daya cegah untuk masyarakat kabupaten Tanah Laut	Tercapainya tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini bagi generasi penerus bangsa	4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6) Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	100%	100%	Sudah Mencapai Target
			5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	7) Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	80,01%	80,01%	Tidak Mencapai Target
			6. Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8) Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100%	75,97%	75,97%	Tidak Mencapai Target
				9) Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang Ideologi pembauran wasbang, bela Negara dan karakter Bangsa	100%	67,35%	67,35%	Tidak Mencapai Target
	Mewujudkan kualitas dukungan operasional organisasi	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.	7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	10) Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	Sudah Terpenuhi Target
				11) Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	Sudah Terpenuhi Target

				12) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB (11.00)	BB	BB	Terpenuhi
			8. Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	13) Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Sudah tercapai Target
			9. Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	14) Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB (11.00)	BB	BB	Sudah Mencapai Target
				15) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sudah tercapai Target
			10. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	16) Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	30 ASN	100%	Sudah Terpenuhi Target
			11. Melaksanakan layanan administrasi perkantoran pemenuhan, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	17) Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	13 Unit	82%	Belum Tercapai target

			12.Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	18) Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 PTT Orang	6 PTT Orang	100%	Sangat Tidak Memenuhi Target
--	--	--	---	---	-------------	-------------	------	------------------------------

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah laut,



Drs.H. RUDI ISMANTO ,M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Dari tabel 3.15 dapat kita simak bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilihat dari capaian sasaran sesuai misi dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran yang memenuhi target ada dalam pada misi 3 menunjukkan angka capaian sebesar 100 %, dan misi 4 menunjukkan angka capaian 100 %. Pada misi yang telah melampaui target harus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi guna mencapai misi yang telah ditetapkan. Semua Capaian sasaran sudah memenuhi target namun ada satu kegiatan tidak terpenuhi karena dalam pelaksanaan ada peraturan yang berbeda sehingga pencapaian sangat kurang Berikut tabel yang menggambarkan capaian sasaran sesuai misi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.16
Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis

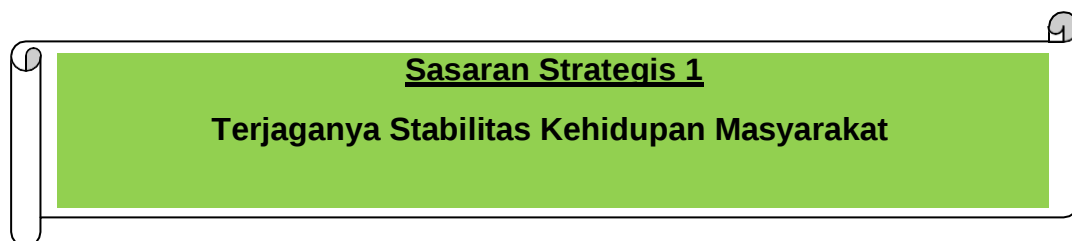
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (outcome)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
SS.1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%
SS.2	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional, Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%	99,95	99,95%
		Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	16,44%	16,44%
SS.3	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%	99,23%	99,24%

		Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
SS.4	4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	80%	80%
SS.5	5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	80,01%	80,01%
SS.6	6. Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100%	75,97%	75,97%
		Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang Ideologi pembauran wasbang, bela Negara dan karakter Bangsa	100%	67,35%	67,35%
SS.7	7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	100%	100 %
		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100 %
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB (11.00)	BB	BB
SS.8	8. Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
SS.9	9. Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB (11.00)	BB	BB

		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
SS.10	10. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	30 ASN	100 %
SS.11	11. Melaksanakan layanan administrasi perkantoran pemenuhan, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	13 Unit	82%
SS.12	12. Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 PTT Orang	6 PTT Orang	100%

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Sebagaimana kita lihat bahwa pada tabel 3.16 akan dijelaskan mengenai analisa terhadap 21 (Dua Puluh satu) capaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.



Capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Persentase potensi gangguan /stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani di Kabupaten Tanah Laut.

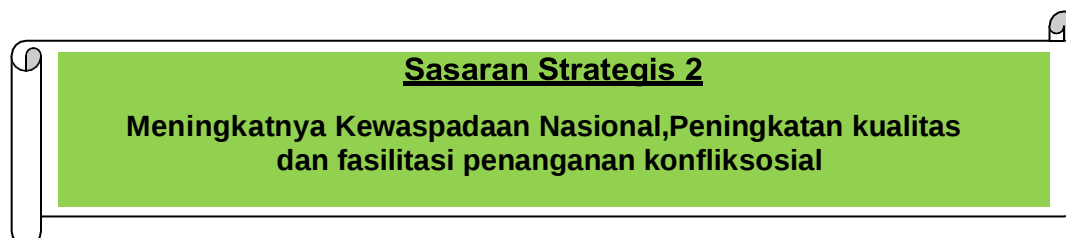
Dengan uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3. 17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100%	100%	100%

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

Maksud dari meningkatnya kewaspadaan Nasional adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan tentang Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik sosial.



Capaian sasaran strategis yang kelima yaitu Meningkatkan kewaspadaan Nasional, peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, Dengan uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2
Peningkatan Kewaspadaan Nasional, peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	%	100%	99,95	99,95%
2	Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100%	16,44%	16,44%

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen .

Partisipasi terhadap kegiatan sosialisasi / rapat / Pertemuan dengan Instansi terkait/ perusahaan, Tim dan Forum wawasan kebangsaan merupakan salah satu indikator dalam sasaran strategis 2. Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan berbagai program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini.

Dalam hal ini program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang mendukung adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

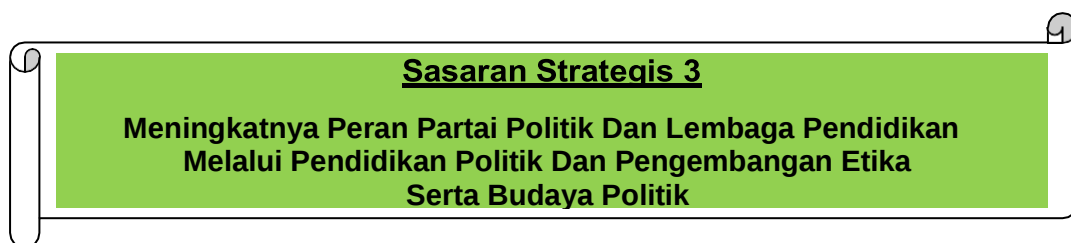
Permendagri nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Hal ini adalah untuk Meningkatkan rasa Nasionalisme, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan mampu mempertahankan eksistensi, identitas, Integritas Bangsa dan Negara serta Deteksi Dini di Daerah. Dan salah satu indikator kinerja ini juga yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota adalah salah satu indikator dalam sasaran strategis 2 Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan berbagai program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini.

Dalam hal ini program yang mendukung adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Wawasan Nasional telah melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota atau aparat terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut maupun di kecamatan pelaksanaannya baru 2 kali pertemuan maka belum aptomal kegiatan tersebut dan *realisainya baru sebesar 16,44%*



Tabel 3.19
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	%	100%	99,23%	99,24%
2	Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	%	100%	100%	100%

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Salah satu yang mendukung indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik pada Eselon III ini adalah Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan 11 Kecamatan yang mengikuti sosialisasi dan rapat parpol adapun program yang mendukungnya proram Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan dengan sub kegiatannya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100% dan terealisasi sebesar 99,24%

2. Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi Parpol di Kabupaten Tanah Laut walaupun tidak ada pemilihan tahun 2022 akan tetapi masih memberikan hibah bantuan keuangan kepada 10 partai yang masih aktif dalam berorganisasi dan juga masih tetap memberikan penyuluhan atau Sosialisasi kepada Parpol Politik yang ada di kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, sasaran strategis 3 adalah kegiatan Sosialisasi Undang Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kegiatan Sosialisasi Parpol

Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku Adapun Partai politik yang terdata yang aktif berpolitik di Kabupaten Tanah Laut ada 10 Partai Politik dengan target 100% realisasinya sebesar 100%

Tabel. 3.20
Partai Politik aktif berpolitik pada Tahun 2022
Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama Partai
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINRDA)
7	Partai Demokrat
8	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Pada tahun 2022 Partai yang aktif berpolitik di Kabupaten Tanah Laut ada 10 Partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk periode tahun 2019- 2024.

Sasaran Strategis 4

. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.21
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatkan pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

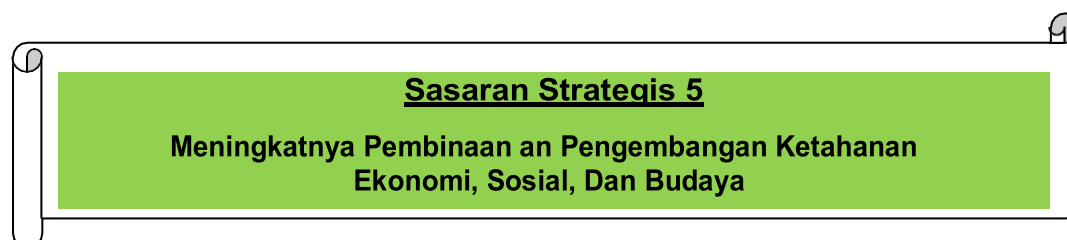
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	%	100%	100%	100%

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas)

Adapun Kegiatan yang ada di Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan didukung kegiatan tersebut adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan yaitu Sosialisasi / Pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP sedangkan sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang Ketahanan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan usulan dana hibah yang di verifikasi oleh Tim Verifikasi dengan Jumlah Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memanfaatkan dana hibah sesuai ketentuan target 3 Lembaga dan terealisasi sebesar 100%



Tabel 3.22
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatkan pembinaan, pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

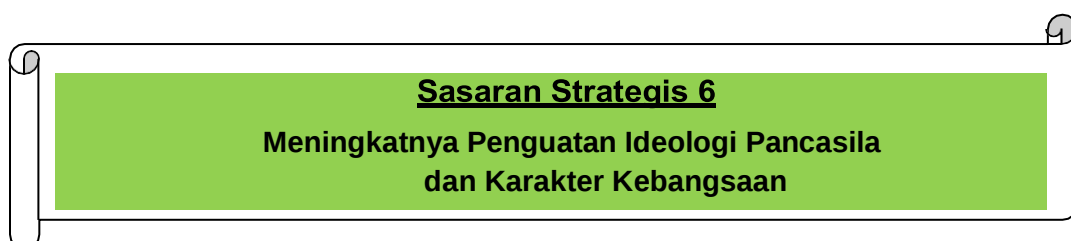
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	%	100%	80%	80 %

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya

Dalam hal ini kegiatan yang mendukung Ketahanan Seni, Budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, Adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan Budaya tersebut yaitu sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani sub kegiatan ini adalah Bidang Ketahanan Seni, Budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi telah menjalankan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Zat Adeptif lainnya.

1. Tempat Gedung Balairung Tuntung Pandang Pelaihari Tanggal 04 Nopember 2022
2. Tempat Gedung Balairung Tuntung Pandang Pelaihari tanggal 30 Nopember 2021 Kegiatan penyuluhan tersebut dengan target 426 Orang dan terealisasi sebesar 426 Orang jadi tercapai 100%



Tabel 3.23
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	%	100 %	100 %	100%
2	Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang Ideologi pembauran wasbang, bela Negara dan karakter Bangsa	%	100	100%	100%

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran.

Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan berbagai program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis 6 ini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melaksanakan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kegiatan yang mendukung terwujudnya program tersebut adalah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kebangsaan dan jumlah kelulusan peserta dalam mengikuti penyuluhan/sosialisasi Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh warga masyarakat dan harus dipicu kearah yang positif dan memiliki sikap tanggung jawab, tegang rasa, mawas diri, kesetiakawanan sosial serta mengutamakan kerukunan masyarakat dalam upaya memajukan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2022 bidang Ideologi melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang di dukung sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, realisasi sebanyak 3270 Orang dengan besaran 99,00%

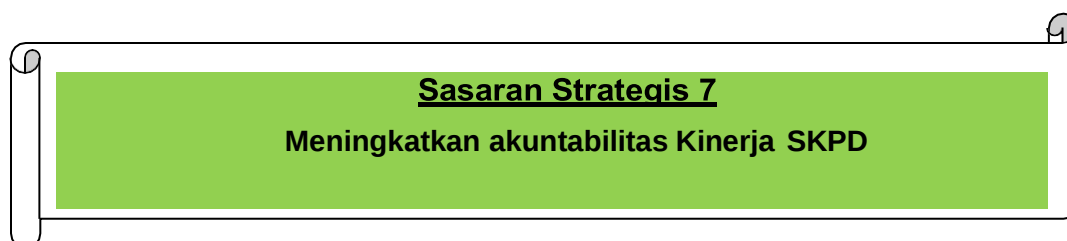
2. **Analisis Pencapaian Indikator Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang Ideologi pembauran wasbang, bela Negara dan karakter Bangsa.**

Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan Sosialisasi pencapaian sasaran strategis 6 yaitu melaksanakan peningkatan pada bela negara, wawasan Kebangsaan, pembauran, bhenika tunggal ika dan sejarah. dengan baik diperlukan upaya peningkatan melalui sosialisasi agar dapat memahami dan menghayati sebagai masyarakat yang perduli bela negara.

Pada tahun 2022 bidang Ideologi melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang di dukung sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, dengan target 100% realisasinya sebesar 100%

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan melaksanakan kegiatannya adalah :

1. Upacara Hari Lahir Pancasila 1 juni 2022.
2. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022.
3. Upacara Hari Bela Negara 22 Desember 2022. (menyesuaikan dengan agenda Pemerintah Daerah)



Tabel 3.24
Analisa Pencapaian Sasaran Strategi 7
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	%	100%	100%	100%

2	Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi KPD	Nilai	BB (11.00)	BB	BB

1. Analisa Pencapaian indikator Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian

Pengelolaan pelayanan administrasi urusan umum dan kepegawaian yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional di bagian sekretariat untuk menunjang kegiatan dalam capaian fisik yang dilakukan oleh bidang sekretariat dan urusan pemberkasan bagi kepegawaian.

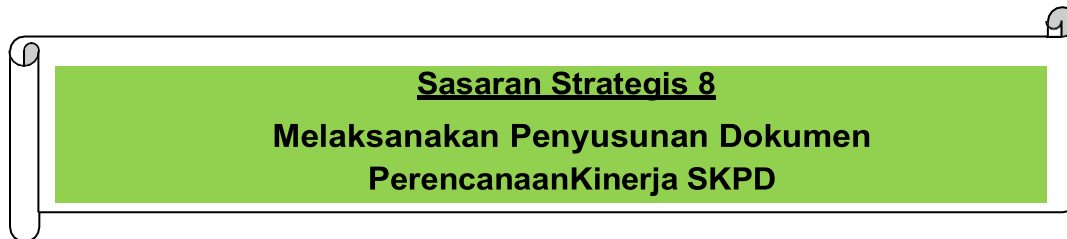
Pada tahun 2022 urusan umum dan kepegawaian mengelola administrasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga akan tertip administrasi baik umum maupun kepegawaian. Analisa Pencapaian indikator Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Dalam pelayanan administrasi perkantoran Perencanaan dan Keuangan yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional belanja operasi yang tersusun dan tertata dapat dilihat dalam capaian fisik maupun keuangannya yang dilakukan oleh bidang sekretariat dan dapat mengendalikan perencanaan keuangan. Pada tahun 2022 Perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan kinerja SKPD melakukan kegiatan yang tersusun sesuai dengan perencanaan dan sesuai peraturan yang ada baik belanja operasi maupun belanja barang dan jasa.

2. Analisa Pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD

Peningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional organisasi dapat dilihat dalam

capaian fisik yang dilakukan oleh bidang sekretariat dalam peningkatan kepuasan pelayanan dengan tujuan dan juga meningkatnya cakupan kenaikan Nilai komponen Perencanaan pada LAKIP SOPD yaitu : dengan nilai LAKIP SKPD BB



Tabel 3.25
Analisa Menyusun sub Strategis 8
Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kinerja SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	Nilai komponen Perencanaan dan Penyusunan pada SKPD	Nilai	BB (11.00)	BB	BB

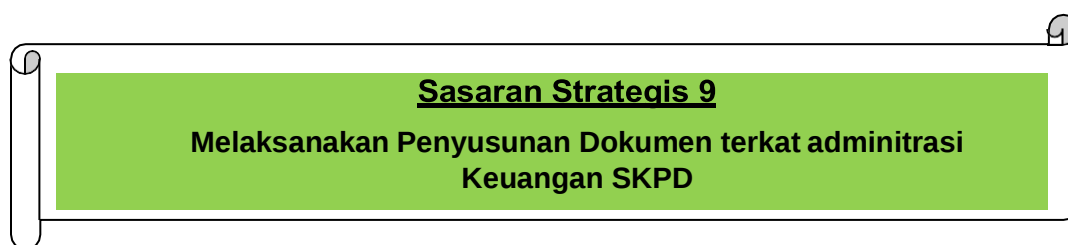
1. Analisa pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu

Jumlah Dokumen kinerja sesuai ketentuan yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional dapat dilihat dalam pelaporan yang beberapa dokumen dengan capaian fisik yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan.

Pada tahun 2022 Perencanaan dan keuangan laksanakan beberapa laporan (Dokumen) sebagai tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaannya membuat laporan (Dokumen) dengan target 5 Dokumen dan terrealisasi 5 Dokumen atau besaran (100%)

2. Analisa pencapaian Indikator Jumlah komponen pelaporan pada LAKIP SKPD

Jumlah Komponen pelaporan pada Lakip SKPD sesuai ketentuan yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional organisasi dapat dilihat dalam capaian fisik yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dibidang sekretariat dalam peningkatan kepuasan pelayanan dengan tujuan dan juga meningkatnya cakupan kenaikan Nilai komponen Perencanaan pada LAKIP SKPD yaitu dengan sasaran nilai pelaksananya BB (11.00) dan dapat mencapai nilai LAKIP SKPD)



Tabel 3.26

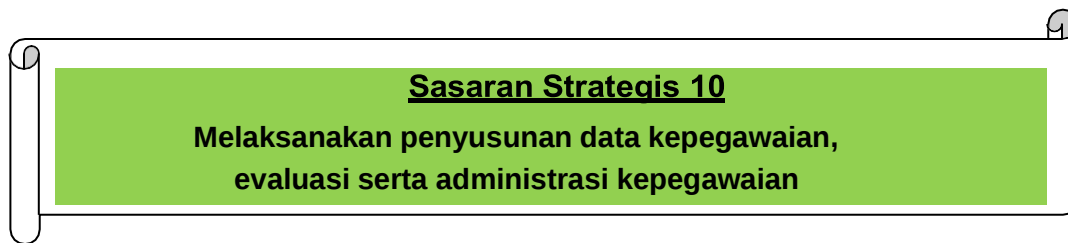
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9
Melaksanakan Penyusuna Dokumen terkait Administrasi
Keuangan SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

1. Analisa pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangansecaraberkala

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala adalah laporan dari Bulanan,Tribulan, Semesteran dan tahunan yang disebut CALK, setiap di akhir tahunperencanaan dan keuangan membuat laporan secara berkala dari Bulanan, Tribulan sampai dengan Tahunan maka kegiatan tesebut selalu pasti dilaporkan karena sebagai tolak ukur kinerja SKPD

Pada tahun 2021 Perencanaan dan keuangan melaksanakan laporan keuangan dengan sasaran 4 Dokumen dan terrealisasi 4 Dokumen atau besaran 100%.



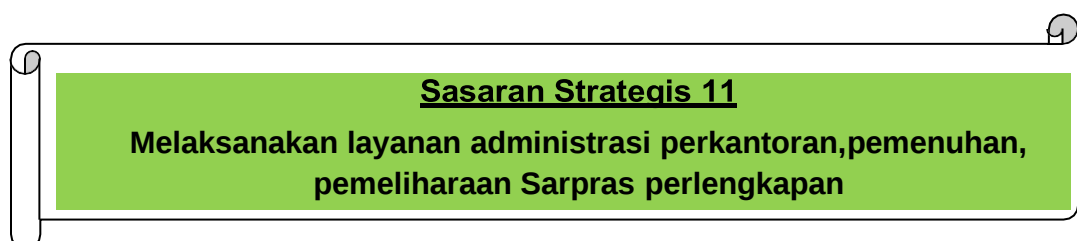
Tabel 3.27
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10
Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	ASN	30 ASN	30 ASN	100%

1. Analisa pencapaian Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yaitu dokumen data kepegawaian harus tertata, terkelola dan tersusun rapi sehingga mudah pencarian untuk pelayanan surat menyurat sesuai dengan ketentuan yaitu terkelolanya arsip surat masuk/keluar.

Pada tahun 2022 kegiatan dokumentasi data dan pelayanan surat menyurat di tata kembali dan terkelola dengan rapi dan bidang yang berwenang menangani adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sasaran 30 ASN dan terpenuhi 30 ASN dengan besaran 100%



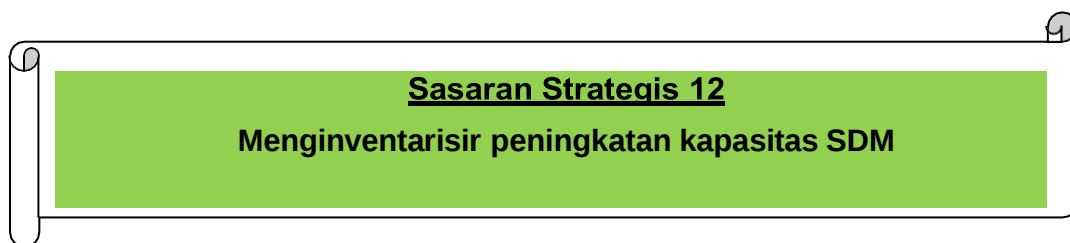
Tabel 3.28
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11
Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemenuhan,
pemeliharaan Sarpras perlengkapan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	Unit	16 Unit	13 Unit	82%

1. Analisa pencapaian Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan

yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional jumlah data aset dan urusan sarana prasarana administrasi perkantoran harus sesuai dan terpelihara dengan ketentuan dan dapat dilihat dalam capaian fisik yang dilakukan oleh sub bagian Umum dan Kepegawaian, adapun kegiatan tersebut sangat menunjang kegiatan operasional didalam gedung maupun di luar gedung.

Pada tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 16 Unit dan capaian 14 unit dan sebesar 88%



Tabel 3.29
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12
Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	ASN	6 PTT	6 PTT	100%

Tabel 3.30
Keberadaan Tenaga PTT

<u>Kegiatan</u> : Penyediaan jasa Umum Kantor	6 orang PTT/ 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
--	-----------------------	----------	----------	------

Adapun kegiatan penyediaan jasa Umum kantor adalah keberadaan PTT yang berjumlah 6 Orang PTT dengan laporan 12 bulan dan sasaran 12 Bulan terpenuhi 12 Bulan atau besaran 100%

1. Analisa pencapaian Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum

Jasa menunjang urusan umum sangatlah di perlukakan karena sangat menunjang sekali dan dalam satu SKPD baik tenaganya maupun kemampuan dalam urusan pekerjaan.

Dalam memperdayaakan tenaga PTT adalah sangat efesien dan efiktif karena tenaga PTT mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pada tahun 2022 Jasa penunjang urusan umum (PTT) mempunyai kontrak selama 12 bulan dalam setiap tahunnya di perbaharui idengan usulan pemberkasan. untuk tiap-tiap sub kegiatan tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum dan sasaran 6 Orang PTT dengan target 12 bulan dan mencapai 12 bulan dengan sebesar 100%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

a. Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai. Berikut tabel realisasi belanja tidak langsung tahun 2021 dan 2022 seperti di bawah ini :

Tabel .3.31
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	4.934,375,837,-	4,677,200,147,-	94,79	2.305.275.896,-
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.987.590.144,-	2.106.224.354,-	70,50	2.987.590.144,-
	Total	5.292.866.040	4.026.014.033,-	76,06	5.292.866.040,-

Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menerima penambahan pada gaji, yaitu gaji 13 dan 14 serta dianggarkannya Tukin (Tunjangan Kinerja) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan peningkatan pula pada belanja Pegawai tahun 2022.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional keperluan Kantor dan operasional di lapangan (keperluan masyarakat agar bisa mengerti dan memahami setiap permasalahan di masyarakat itu sendiri) Berikut tabel Rekapitulasi Belanja Barang dan jasa Tahun 2022.

Tabel.3.32 Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022								
No	Unit Kerja	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggran 2022 (Rp)	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					Kinerja	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2	Kegiatan : Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.934.375.8376	100	%	4.677.200.147	94,79%
4	Kegiatan : Adminstarsi Umum Perangkat Daerah							
7	Sub Kegiatan : Penyediaan Koponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	2.620.245	100	%	1.765.000	67,36%
8	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44 Jenis 2 paket	106.762.934	100	%	497.886.215	91,69%
9	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	16.425.059	100	%	14.868.780	90,52%
10	Sub Kegiatan : Peyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	1.250.000	100	%	1.200.000	96,00%

11	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun/ 12 Bln 300 OK 172 OK	183.630,000	100	%	181.729.814	98,97%
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah							
12	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis 12 Bln	61.128.389	95	%	37.898.629	62,00%
13	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129 buahis	30.872.205	95	%	21.698.000	80,93%
14	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	32 Jenis 6 Org /12 Bln	156.017.046	100	%	156.017.046	96,74%
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
15	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas Atau kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	1 Unit/12 Bln	27.191.111	80	%	16.618.575	61,12%
16	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan perzjinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Japangan	13 Unit 3 Unit	143.520.000	82	%	93.191.277	64,93%
17	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unitt	20.000.000	80	%	12.815280	64,08%
II	PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							

	Kegiatan : Perumusanng Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11 Kali 5 Kali 3.300 Orang	144.535.305	99	%	109.808.809	75,97%
16	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Kali Apel 88 Kali 20 Kali	74.922.831	100	%	50.470.886	67,36%
II	PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							

	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksannya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Desa 10 Parpol 720 Org 100 Org 3 Kali 11 Kec	1.587.111.014	100	%	1.575.021.900	99,24%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksannya di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Ormas (PWRI, ICMI, FKUB)	145.000.000	100	%	145.000.000	100%
	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Kali 426 Org 90 Org/3 kali 17 Org	247.145.879	99	%	197.735.292	80,01 %
	PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAANNASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							

Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	171.175.260	88	%	105.607.450	61,69%
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16 Kegiatan	434.852.000	85	%	350.207.500	80,53%
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	200,000,000	67	%	32,890,000	16,44%

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Kaban Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Dari tabel 3.33 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2022 pada belanja Operasional sebesar Rp 1.547.027.608,- dari total anggaran sebesar Rp 1.989.647.040,- atau sebesar 77,75 % realisasi keuangan dan 89,32 % realisasi fisik terdiri dari :

Tabel 3.33
Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat menuju kehidupan politik yang harmonis dan berakhlak,	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	698.271.976	513.473.416	73,53%
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	612.236.410	326.280.263	53,29%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	272.127.030	196.303.198	72,13%
2	Terwujudnya tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini bagi masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	380.271.090	283.325.600	74,50%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.824.698.096	1.565.974.096	85,82%

3	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.897.644.602	4.432.680.321	75,16%
---	--	--	---------------	---------------	--------

Ringkasan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Ringkasan APBD Tahun 2021 terhadap Tahun 2022

No.	2021		2022	
	Belanja Operasi	Jumlah	Belanja Operasi	Jumlah
1	Belanja Pegawai	4.026.014.033,00	Belanja Pegawai	4.673.690.147,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.625.720.528,00	Belanja Barang dan Jasa	1.302.135.622,00
3	Hibah (Bantuan keuangan)	1.734.698.550,00	Hibah (Bantuan keuangan)	4.609.698.550,00
4	Belanja Modal	23.800.111,00	Belanja Modal	67.028.000,00
	Total	7.419.233.111,00	Total	10.653.552.319,00

Realisasi fisik. Dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi fisik ada peningkatan di tahun 2022 sebesar 7,72% dan sedangkan pada realisasi keuangan ada tahun 2022 kenaikan sebesar 30,35%.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

No			No		
	Nama Program	Nama Kegiatan / Sub kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN//KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen perencanaan dan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK SKPD			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			

2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
		Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Total Anggaran			Total Anggaran	

Tabel.3.36
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

	2021	2022	2023
Program	8	6	6
Kegiatan	11	9	12
Sub Kegiatan	27	19	30

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 , Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel.3.37

Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Tahun 2021 dan 2022

Versi LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Realisasi tahun 2021 (Rp)	Realisasi tahun 2022 (Rp)	% Kenaikan/ Kurangan
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASIONAL	7.386.433.111,00	10,652,552,319,00	94,20%
	Belanja pegawai	4.026.014.033,00	4.673.690.147,00	94,72%
	Belanja barang dan Jasa	1.625,720,528,00	1,302,135,622,00	76,84%
	Belanja Hibah	1.734.698.550,00	4,609,698,550,00	100%
2	BELANJA MODAL	32.800.000,00	67,028,000,00	96,12%
	Belanja Modal	32.800.000,00	67,028,000,00	9612%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.419.233.111,00)	(10,652,552,319,00)	0,00%

Realisasi pendapatan asli daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebesar Rp.10,652,552,319,00) (Tahun 2021 sebesar Rp. 7.419.233.111,00) ada peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sehingga semua kegiatan di laksanakan sesuai dengan ketentuan dan hibah bantuan keuangan untuk 10 Partai dan Hibah Ormas mencapai 100%

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Kaban Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,Drs.H.RUDI ISMANTO.M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pembuatan laporan kinerja antara lain

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 Sasaran Strategis dan 32 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 21 indikator sasaran yang realisasinya memenuhi target, namun pada tahun 2022 ada 13 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target. Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah mencapai capaian kinerja (realisasi kinerja fisik) sebesar 99,06%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 91,34% ada sedikit kenaikan sebesar 7,72 %

Maka dapat dijelaskan bahwa untuk hasil sasaran yang tercapai ada pada sasaran yang belum mencapai 100% kegiatanpun semua sudah optimal pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kekurangan Tenaga yang Handal dan Kreatif sehingga kegiatan berjalan tidak sesuai yang diharapkan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Demikian laporan kinerja tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut disampaikan. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Pelaihari, 2 Januari 2023

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680916 199010 1 001

1. Eselon II (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Capaian indikator kinerja utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Eselon II

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase Potensi gangguan / stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%

Rumus Indikator Kinerja Utama

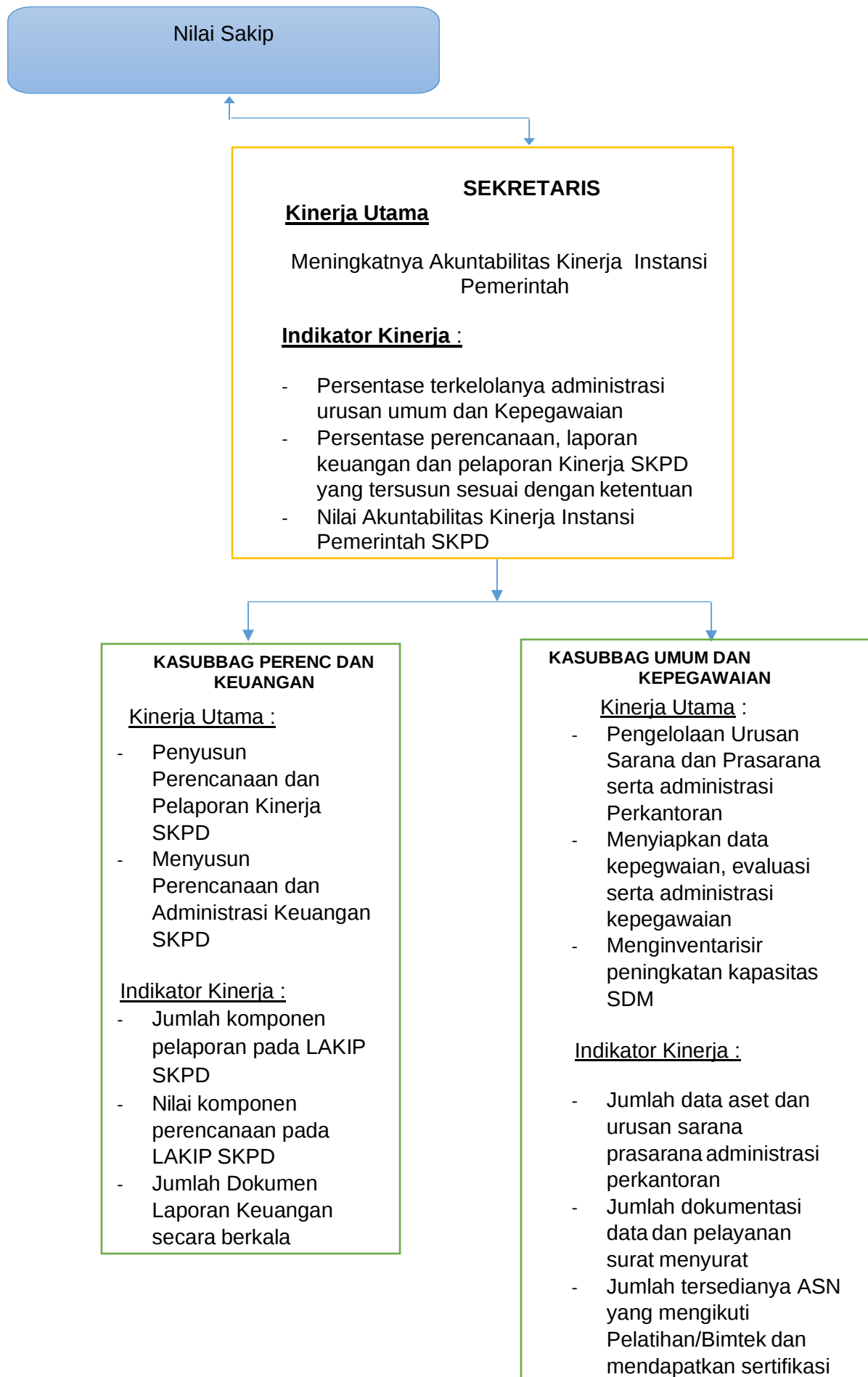
No	Kinerja Utama Outcome/Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase Potensi gangguan / stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jml gangguan /konflik sosial yang di tangani}}{\text{Jml gangguan/konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Semua Bidang

Pelaihari, 03 Januari 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



Drs.H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001



POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

Tahun 2022

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan

Esselon II

KEPALA BADAN

Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat

Indikator : Persentase potensi gangguan /stabilitas kehidupan Masyarakat yang tertangani

Esselon III

KABID WAAWASAN NASIONAL

Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator :
Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

KABID POLITIK

Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator :
Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

KABID KETAHANAN

1. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Indikator :
1. Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten
2. Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya

KABID WAWASAN KEBANGSAAN
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Indikator :
Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan

Esselon IV

KASUBBID KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan pencegahan tindak Kriminal terhadap ancaman, tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) pemantauan, pengawasan dan deteksi dini di Daerah.

Indikator :
1. Jumlah kegiatan / sosialisasi / rapat /pertemuan dengan instansi terkait /perusahaan, Tim dan Forum
2. Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga

KASUBBID PENANGANAN KONFLIK

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan serta penanganan konflik

Indikator :
Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan rencana aksi Daerah (RAD) tim terpadu penanganan konflik sosialisasi dan jumlah desa sadar konflik

KASUBBID IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Indikator :
Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang mengikuti pemilu

KASUBBID KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITASI PEMILIHAN UMUM
Penyelenggaraan Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu

Indikator :
Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai

KASUBBID KETAHANAN SENI DAN BUDAYA

Penyelenggaraan Ketahanan Seni dan Budaya

Indikator :
Jumlah Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

KASUBBID KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI
Penyelenggaraan Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Indikator :
1. Jumlah pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Jumlah Hibah Uang kepada Ormas yang Berbadan Hukum

KASUBBID BINA IDEOLOGI

Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan Pembinaan Ideologi, karakter bangsa , Bela Negara dan wawasan kebangsaan

Indikator :
Jumlah Monitoring dan evaluasi serta Sosialisasi Ideologi, bela negara wasbang, Pembauran, bhineka tunggal ika

KASUBBID WAWASAN KEBANGSAAN

Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyuluhan Ideologi Wawasan Kebangsaan

Indikator :
Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Wawasan

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT

S.D BULAN : JANUARI, FEBRUARI, MARET 2022 (I)

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	n	12 bulan	3 bulan	Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	4,673,690,147	-	769,956,273	769,956,273	25.00%	16.47%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7 jenis	0 Jenis	SILPA	2,620,245	-	-	-	0.00%	0.00%	
8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	42 jenis	0 Jenis	SILPA	35,003,433	-	-	-	0%	0.00%	
8 01 01 2.06 05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	9 jenis	1 jenis	SILPA	34,972,808	2,579,900	-	2,579,900	22.22%	7.38%	
8 01 01 2.06 06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan/ peraturan perundangan	12 bulan	3 bulan	SILPA	1,250,000	300,000	-	300,000	16.67%	24.00%	
8 01 01 2.06 09	5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah dalam tahun spped luar dan dalam provinsi	1 tahun/ 12 bln	1 thn/3 bln	SILPA	98,630,000	12,959,600	-	12,959,600	11.44%	13.14%	
		Jumlah konsumsi makanan dan minuman	400 OK	69 ok								
		Jumlah yg melaksanakan koordinasi dan konsultasi	296 OK	48 ok								
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 jenis/ 12 bulan	1 jenis/3 bln	SILPA	89,717,900	8,260,155	-	8,260,155	25.00%	9.21%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 01 2.08 03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	143 buah	0 buah	SILPA	34,753,468	-	-	-	0.00%	0.00%	
8 01 01 2.08 04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat pelayanan umum kantor	32 jenis	3 jenis	SILPA	171,025,991	24,315,120	-	24,315,120	28.00%	14.22%	
		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 org/ 12 bln	6 org/2 bln								
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 kepalabadan	1 unit/ 12 bln	0 unit/ 2 bln	SILPA	32,197,422	1,500,000	-	1,500,000	16.67%	4.66%	
8 01 01 2.09 02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2	13 unit	4 unit	SILPA	129,092,265	3,258,000	-	3,258,000	25.00%	2.52%	
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 kepalabadan	3 unit	0 unit								
8 01 01 2.09 06	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	42 unit	3 unit	SILPA	27,250,000	663,000	-	663,000	4.76%	2.43%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan											
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah penyuluhan ideologi, wasbang, pancasila dan karakter kebangsaan pada lembaga pendidikan peserta asal dari kabupaten	11 kali	1 kali	SILPA	159,884,659	950,000	-	950,000	9.09%	0.59%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah pelatihan/ diskusi/ permainan/lomba/outbound/ seminar lokakarya ideologi, wasbang	5 kali	3 kali								
		Jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi	3300 orang	430 Org								
8 01 02 2.01 05	2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah apel wawasan kebangsaan	3 kali Apel Belanegara, Harkitnas, Hari Lahir Pancasila	0 Kali Apel	SILPA	70,190,988	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah monitoring dan evaluasi	88 kali	0 Kali								
		Jumlah rapat koordinasi FPK Kecamatan	20 kali	0 Kali								
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah desa sadar politik	2 desa	0 Desa	SILPA	1,587,136,645	-	-	-		0.00%	

[illegible]

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di	Jumlah penyuluhan	2 kali	0 Kali	SILPA	124,389,879	-	-	-		0.00%	
		Jumlah tes narkoba	100 orang	0 Org								
		Peserta penyuluhan	200 orang	0 Org								
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Jumlah kali pembayaran Tim Terpadu	6 kali	0 kali	SILPA	84,622,592	-	-	-		0.00%	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Tim Terpadu	6 kali	0 kali								
		Jumlah pembentukandesa sadar konflik	2 desa	0 desa								
8 01 06 2.01 04	1 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah bulan pembayaran HonorTNI AL	12 bulan	0 bln	SILPA	165,377,096	-	-	-		0.00%	
		Jumlah kali pelaksanaan rapat	25 kali	0 kali								

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah kali pelaksanaan sosialisasi	12 kali	0 kali								
		Jumlah kali pembayaran Honor FKDM	5 kali	0 kali								
		Jumlah kali pembayaran Honor Tim KDPD	10 kali	0 kali								
		Jumlah Tim yang sudah terbentuk	3 tim	0 tim								
						7,666,805,538	54,785,775	769,956,273	824,742,048	10.45%	10.76%	

Pelaihari, April 2022

KEPALA BADAN,

 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 199010 1 001

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : APRIL, MEI, JUNI 2022 (II)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di	Jumlah penyuluhan	3 kali	2 kali	SILPA	124,389,879	17,948,300	-	17,948,300	12.26%	14.43%	
		Jumlah tes narkoba	426 orang	126 Org								
		Peserta penyuluhan	90 orang/ 3 kl	60 org/ 2 kl								
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Jumlah kali pembayaran TimTerpadu	6 kali	0 kali	SILPA	84,622,592	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Tim Terpadu	6 kali	0 kali								
		Jumlah pembentukandesa sadar konflik	2 desa	0 kali								
8 01 06 2.01 04	1 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Jumlah bulan pembayaran HonorTNI AL	7 bulan	5 bulan	SILPA	165,377,096	83,180,360	-	83,180,360	36.36%	50.30%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah kali pelaksanaan rapat	15 kali	5 kali								
		Jumlah kali pembayaran HonorFKDM	6 kali	1 kali								
		Jumlah kali pembayaran Honor Tim KDPD	2 kali	0 kali								
		Jumlah Tim yang sudah terbentuk	3 tim	0 tim								
						7,666,805,538	247,290,378	2,818,652,364	3,065,942,742	20.36%	39.99%	

Pelaihari, Juli 2022

KEPALA BADAN,

 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 199010 1 001

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT

S.D BULAN : JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 2022 (III)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di	Jumlah penyuluhan	3 kali	1 kali	SILPA	124,389,879	66,315,198	-	66,315,198	88.12%	53.31%	
		Jumlah tes narkoba	426 orang	182 Orang								
		Peserta penyuluhan	90 orang/ 3 kl	30 org/ 1 kl								
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Jumlah kali pembayaran TimTerpadu	6 kali	0 Kali	SILPA	84,622,592	-	-	-	0%	0.00%	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Tim Terpadu	6 kali	0 kali								
		Jumlah pembentukandesasadar konflik	2 desa	0 desa								

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 06 2.01 04	1 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah bulan pembayaran Honor TNI AL	7 bulan	2 bulan	SILPA	165,377,096	37,525,000	-	37,525,000	21.2%	22.69%	
		Jumlah kali pelaksanaan rapat AL 7 kl, FKDM 6 kl, KDPD 2 kl	15 kali	3 kali								
		Jumlah kali pembayaran Honor FKDM	6 kali	2 kl								
		Jumlah kali pembayaran Honor Tim KDPD	2 kali	0 kali								
		Jumlah Tim yang sudah terbentuk	3 tim	0 tim								
						7,666,805,538	269,726,137	1,462,807,745	1,630,286,482	16.87%	21.26%	

Pelaihari, 04 Oktober 2022

KEPALA BADAN,


Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT

S.D BULAN : OKTOBER, NOPEMBER, DESEMBER 2022 (IV)

[illegible]

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 01 2.08 02	1 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 jenis/ 12bulan	1 jenis/3 bln	SILPA	61,128,389	37,898,629	-	37,898,629	46.69%	62.00%	
8 01 01 2.08 03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	143 buah	69 Buah	SILPA	30,872,205	21,698,000	-	21,698,000	53.44%	70.28%	
8 01 01 2.08 04	3 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah jenis alat pelayanan umumkantor	32 jenis	0 jenis	SILPA	161,276,132	53,766,697	-	53,766,697	27.27%	33.34%	
		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umumkantor	6 org/ 12 bln	6 Org/3 bln								
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
8 01 01 2.09 01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 kepalabadan	1 unit/ 12 bln	1 unit/ 4 bln	SILPA	27,191,111	7,531,200	-	7,531,200	33.33%	27.70%	
8 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2	13 unit	1 unit	SILPA	114,074,980	35,634,275	-	35,634,275	61.54%	31.24%	
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 lapangan	3 unit	0 unit								
8 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25 unit	15 unit	SILPA	20,000,000	9,989,880	-	9,989,880	64.00%	49.95%	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan											
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ikadan sejarah kebangsaan	Jumlah penyuluhan ideologi, wasbang, pancasila dan karakter kebangsaan pada lembaga pendidikan peserta asal dari kabupaten tanah laut	11 kali	0 kali	SILPA	144,535,305	28,977,158	-	28,977,158	99.00%	20.05%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah pelatihan/ diskusi/ permainan/lomba/outbound/ seminar lokakarya ideologi, wasbang	5 kali	2 kali								
		Jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi	3300 orang	2212 Orang								
8 01 02 2.01 05	2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah apel wawasan kebangsaan	3 kali Apel Bela negara, Harkitnas, Hari Lahir Pancasila	2 kali Apel Bela negara, Harkitnas, Hari Lahir Pancasila	SILPA	74,922,831	50,470,886	-	50,470,886	59.46%	67.36%	
		Jumlah monitoring dan evaluasi	88 kali	24 kali								
		Jumlah Rapat Koordinas FPK Kecamatan	20 kali	5 kali								
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						+					
8 01 03 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	2 desa	0 desa	SILPA	1,587,111,014	77,289,100	1,497,732,800	-	0.00%	0.00%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		jumlah parpol yg menerima bantuanhibah	10 parpol	0 parpol								
		Jumlah peserta sosialisasi pemilih pemula	720 org	220 Org								
		Jumlah peserta sosialisasi hibah banpol	100 orang	0 Org								
		Jumlah rapat	3 kali	0 kali								
		Jumlah wilayah monitoring	11 kec	11 Kec								
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											
8 01 04 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah ormas yangmendapat hibah	3 ormas, PWRI, ICMi dan FKUB	0 Ormas	SILPA	145,000,000	-	145,000,000	-	0.00%	0%	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah penyuluhan	3 kali	0 kali	SILPA	247,145,879		-	-	2.78%	0.00%	
		Jumlah tes narkoba	426 orang	118 org								
		Peserta penyuluhan	90 orang/ 3 kl	0 org/0 kali								

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Peserta pembelajaran	17 org	17 org								
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kali pembayaran Tim Terpadu	0	0	SILPA	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Tim Terpadu	-	0								
		Jumlah pembentukandesa sadar konflik	-	0								
8 01 06 2.01 04	2 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah bulan pembayaran Honor TNI AL	10 bulan	3 bulan	SILPA	3,249,957,296	248,216,610	3,000,000,000	3,248,216,610	31.0%	99.95%	
		Jumlah kali pelaksanaanrapat 4 kl, FKDM 6 kl	10 kali	2 kali								
		Honor FKDM Kabupaten	6 kali	3 kali								
		Jumlah kali pembayaran Honor FKDM Kecamatan	2 kali	2 kali								
		Honor Tim KDPD	3 Tim	3 Tim								

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 06 2.01 06	3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forkopimda	2 kali	2 kali	PAD	200,040,000	32,890,000	-	32,890,000	67.00%	16.44%	
						11,308,319,217	887,164,769	6,003,293,145	5,170,436,014	51.38%	45.72%	

Pelaihari, 02 Januari 2023

KERALA BADAN,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

**LAPORAN REALISASI KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
ANGGARAN 2022 (JANUARI s/d DESEMBER 2022)**

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT
S.D BULAN : DESEMBER 2022

[illegible]

[illegible]

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 02 2.01 03	1 Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah penyuluhan ideologi, wasbang, pancasila dan karakter kebangsaan pada lembaga pendidikan peserta asal dari kabupaten tanah laut	11 kali	11 kali	SILPA	144,535,305	109,808,809	-	109,808,809	99.00%	75.97%	
		Jumlah pelatihan/ diskusi/ permainan/lomba/outbound/ seminar lokakarya ideologi, wasbang	5 kali	5 kl								
		Jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi	3300 orang	3272 Orang								
8 01 02 2.01 05	2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah apel wawasan kebangsaan	3 kali Apel Bela negara, Harkitna s, Hari Lahir Pancasila	3 kali Apel Belanegara, Harkitnas, HariLahir Pancasila	SILPA	74,922,831	50,470,886	-	50,470,886	100%	67.36%	
		Jumlah monitoring dan evaluasi	88 kali	88 kali								
		Jumlah Rapat Koordinas FPK Kecamatan	20 kali	20 kali								
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						+					

[illegible]

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 05 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah penyuluhan	3 kali	3 kali	SILPA	247,145,879	197,735,292	-	197,735,292	99%	80.01%	
		Jumlah tes narkoba	426 orang	426 org								
		Peserta penyuluhan	90 orang/ 3 kl	90 org/ 3 kl								
		Peserta pembelajaran	17 org	17 org								
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8 01 06 2.01 03	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kali pembayaran Tim Terpadu	-	0	SILPA	-	-	-	-	0%	0.00%	
		Jumlah pelaksanaanRapat Tim Terpadu	-	0								
		Jumlah pembentukandesadar konflik	-	0								
8 01 06 2.01 04	2 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah bulan pembayaran HonorTNI AL	12 bulan	12 bulan	SILPA	3,249,957,296	248,216,610	3,000,000,000	3,248,216,610	100.0%	99.95%	

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah kali pelaksanaan rapatAL 4 kl, FKDM 6 kl	10 kali	10 kali								
		Honor FKDM Kabupaten	6 kali	6 kl								
		Jumlah kali pembayaran HonorFKDM Kecamatan	2 kali	2 kali								
		Honor Tim KDPD		-								
8 01 06 2.01 06	3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forkopimda	2 kali	2 kali	PAD	200,040,000	32,890,000	-	32,890,000	67%	16.44%	
			5830	5775		11,308,319,217	1,336,129,372	9,319,932,947	10,656,062,319	99.06%	94.23%	

Pelaihari, 02 Januari 2023

KEPALA BADAN,

 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
 NIP. 19680916 1999010 1 001

1. Reviu Program dan Kegiatan 2021-2022

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2021)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Tahun 2022)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Penyediaan Jasa Pelayanan dan perlengkapan Kantor
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
13 Penyediaan Jasa Pelayanan dan perlengkapan Kantor	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
18	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
19	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		14 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

2. Program / Kegiatan Tahun 2022

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Adminisstrasi Umum Perangkat Daerah	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYAPOLITIK	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program dan Keuangannya

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA (93,59%)
- 2) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (73,03%)
- 3) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (99,24%)
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (100,00%)
- 5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (80,01%)
- 6) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (95,10%)

Rata-rata pencapaian impementasi renstra tahun ke-4 adalah Tahun 2021 (75,43.) dan Tahun 2022 (94,23%) (terjadi penurunan dari tahun sebelumnya ada kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Kaban Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

Matrik Keselarasan 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	LAPKIN 2021						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022			Cashcading 2021		Pemilik
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	100%	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	100%	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	100%	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Kepala Badan
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	100%	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas , Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitas Pencegahan penanganan konflik dan Penyampaian Informasi Intelijen	
					Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%					Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%		Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%		Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kepala Bidang Wasnas
		Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%		Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi DP3 Rapat Partai Politik dan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100%	Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah desa yang aktif berpolitik	100%	Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah desa yang aktif berpolitik	Kepala Bidang Politik
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	Kepala Bidang Ketahanan

		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan an Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%		Pembinaan Dan Pengembangan an Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan an Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan an Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	100%	Meningkatnya Pembinaan an Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya	Kepala Bidang Ketahanan
		Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100%		Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100%	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	100%	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	Kepala Bidang Wasbang
					Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%					Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%		Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%		Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang Wasbang
	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi yang tertib efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	Sekretaris
					Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Sekretaris
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	BB		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	Sekretaris
				Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dok	Melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen dan perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	

				Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	BB	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LAKIP SKPD	
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dok		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dok		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dok		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dok		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	
				Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	30 ASN	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	
				Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	16 Unit	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemeliharaan Sarpras perlengkapan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai ketentuan	
				Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	6 Org	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	Jumlah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Umum	

Pelaihari, 31 Desember 2023

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



Drs.H.RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

K E P U T U S A N KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 900 / 1 /Kesbangpol/I/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
- c. Bahwa Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
- KEDUA : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022;
 3. Rencana Kerja Tahun 2022;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 4 Januari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H.RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
TANAH LAUT
NOMOR : 900 / 09 /Kesbangpol/I/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PenanggungJawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Penyusun Proram Anggaran dan Pelaporan 2. Kabid Politik 3. Kabid Wawasan Nasional 4. Kabid Ketahanan 5. Kabid Wawasan Kebangsaan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21155

Email : kesbang.tala@gmail.com

Pelaihari 70814

K E P U T U S A N **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** **KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR: 900/2/Kesbangpol/I/2023

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BADAN KESETUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor).
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT.

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 3 Januari 2023.

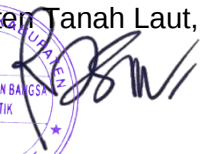
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 900/10/Kesbangpol/I/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

A. INFORMASI PROSEDUR

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nomor SOP	/ BADAN KESBANGPOL/2023
		Tgl pembuatan sebelum disahkan	Januari 2023
		Tgl uji coba	
		Tgl Pengesahan	
		Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut,  Drs.H. Rudi Ismanto, M.Si NIP. 19680916 199010 1 001
Dasar Hukum	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	
	Pengendalian		

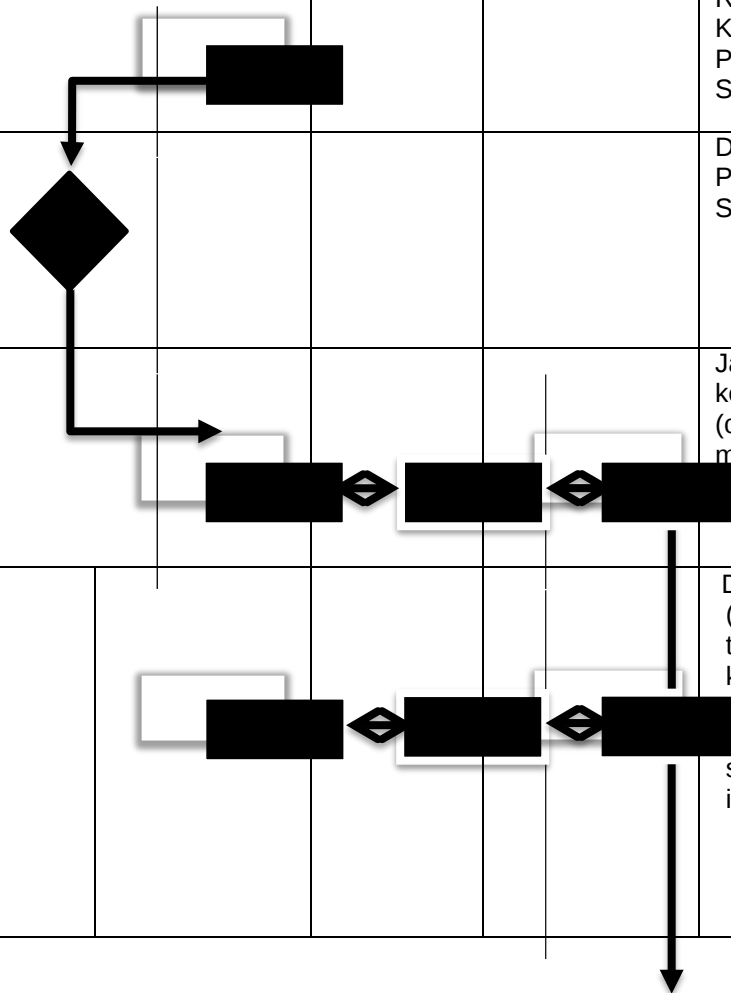
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	1. Tim Penyusunan Lakip terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf Pendukung. 2. kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi Komputer. 3. Kualifikasi anggota tim penyusunan Lakip adalah mempunyai Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP 4. Hasil penyusunan Lakip adalah berupa laporan Lakip SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD
Identifikasi Risiko	Pencatatan dan Pendataan
1. Keterbatasan pengetahuan tim penyusun 2. Peraturan yang selalu berubah (dinamis) 3. Tidak lengkapnya data yang diperlukan	

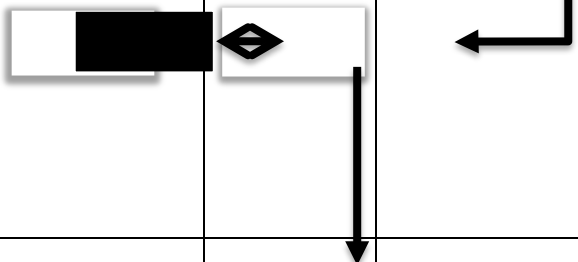
B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun Lakip SKPD					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD	



2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.				Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun SKPD Lakip	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip	
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,				Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun Lakip SKPD ditandatangani Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/ Informasi				Jadwal/agenda kerja dan matrik (checklist) materi/bahan penyusunan Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip	
5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD				Data dan informasi (tupoksi, struktur tata laksana, kepegawaian) dan informasi sebelumnya dan info lainnya	14 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja, potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorientasi hasil	



6	Analisis						Gambaran tupokasi, SDM, kinerja dan keuangan SKPD, isu-isu strategis.visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,progra m/kegiatan/indikato r kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat, capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu, strategis, Ter indetifikasi program/ kegiatan yang ber oreantasi hasil	
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD						Draf rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analitis	2 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD						Naskah Rancangan Lakip SKPD	7 Hari	Penjelasan rancangan Lakip SKPD (visi misi ,keseleraan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan Keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD						Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan	

								Politik	
10	Penetapan Lakip SKPD					Lakip yang disusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan penggandaan dokumen oleh Sekretariat	

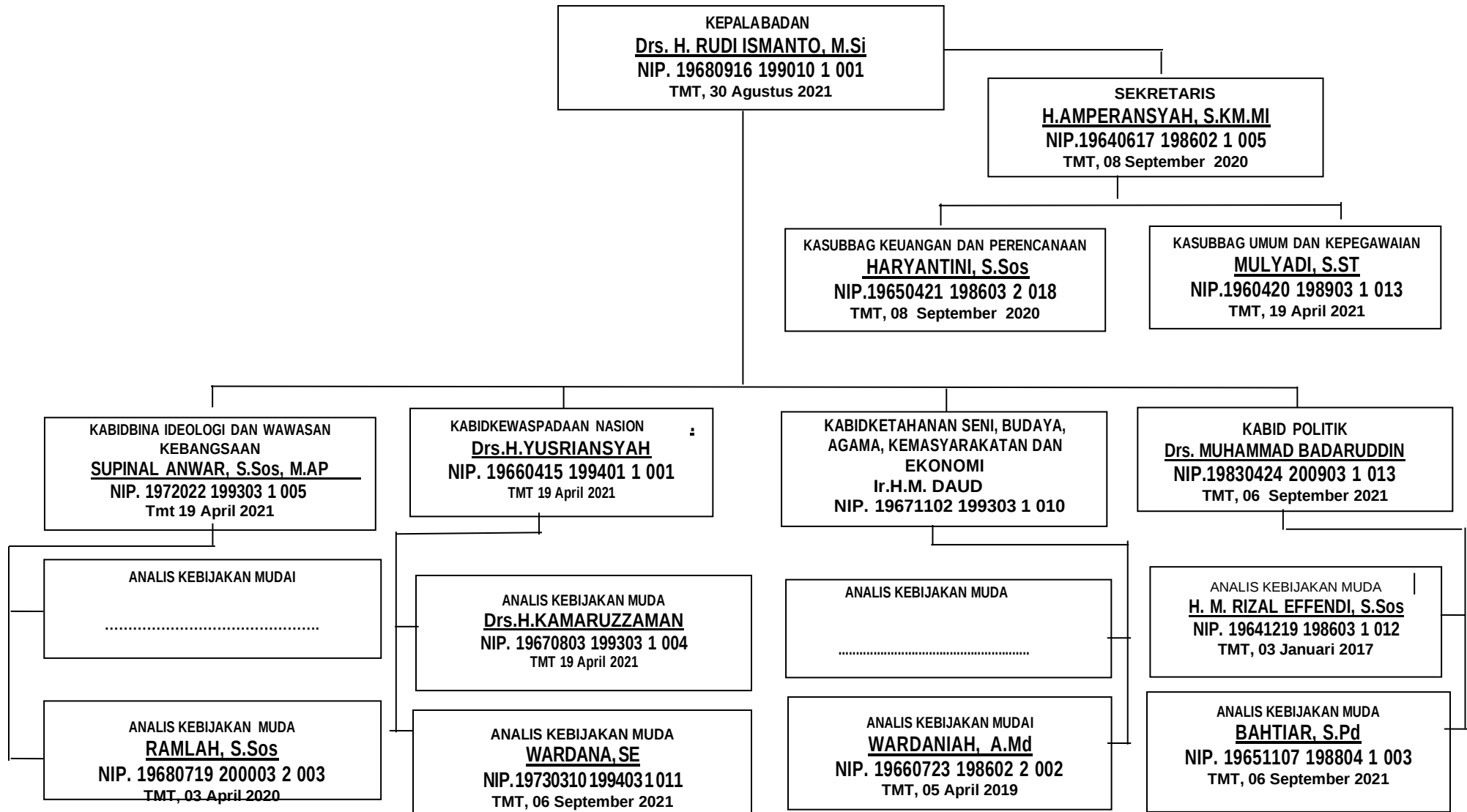
Pelaihari, 3 Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021**



Pelaihari, 31 Desember 2022
Kepala Badan Kesbanpol



Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001